



# Ahok Tolak Kompromi, Hari Ini Mediasi

**Palmerah, Warta Kota**

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mendatangi Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3). Dalam hasil rapat tersebut, Ahok tetap bersikukuh tidak akan berkompromi mengenai e-budgeting. "Kita tetap tidak akan berkompromi, Mendagri juga tidak minta kita untuk kompromi. Yang mendagri dan Presiden minta adalah tetap e-budgeting semua anggaran harus sesuai dengan RPJMD sesuai dengan KUPPA sesuai untuk pembangunan DKI," kata Ahok usai rapaf di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3).

Artinya, lanjut Ahok, Presiden dan Mendagri, tetap harus mempertahankan e-budgeting supaya bisa menghemat uang negara. "Itu dasarnya. Soal nanti perselisihan dengan DPRD setelah pembahasan di sini besok akan membahas dengan DPRD. Dan pak Mendagri sudah punya konsep solusinya, yang pasti APBD DKI harus tetap diketok sesuai dengan frame waktu," katanya.

Menurut rencana, Kamis (5/3) ini, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan mediasi terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Mediasi tersebut terkait dengan pembahasan masalah RAPD DKI 2015 yang saat ini membuat hubungan keduanya memanas.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, tidak memiliki persiapan khusus untuk mengikuti mediasi tersebut. Pihaknya yakin, bahwa nantinya APBD DKI 2015 tetap akan menggunakan e-budgeting. "Tidak ada persiapan apa-apa. Sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Kami tidak membawa bukti-bukti baru, tetap dengan yang sebelumnya. Karena ini yang akan kami bahas," kata Saefullah, ditemui *Warta Kota*, di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (4/3) malam.

Menurut Saefullah, pihaknya akan hadir, bersama dengan ku-

rang lebih 30-an SKPD. Seperti Gubernur DKI Jakarta, Wagub, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, serta SKPD lainnya. "Sama seperti tadi (kemarin-red) jumlahnya yang akan ke Kemendagri. Kami bersama-sama ke sana," katanya.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, mediasi tersebut harus dilakukan agar evaluasi bisa berjalan. "Jadi Dirjen Keuangan Daerah (Kemendagri-Red) punya kewajiban sebagai institusi pembina dalam hal proses pengesahan APBD. Karena disitulah tempat evaluasi dari APBD yang kita sahkan. Ya, kita mau lihat seperti apa, dan kemarin kita sudah sampaikan juga bahwa Mendagri harus juga mendengar apa yang kita sampaikan tentang prosedur, dan proses pembahasan APBD," katanya.

Selain itu, menurut Taufik, mediasi tersebut, agar APBD segera bisa diturunkan dan pembangunan bisa dilanjutkan. "Saya kira yang paling penting adalah DPRD DKI harus punya APBD, untuk proses pembangunan kedepan. Tapi mediasi yang dilakukan ke Kemendagri itu, karena memang fungsinya. Tapi dia juga nggak bisa hilangkan hak angket yang telah dilakukan oleh DPRD," katanya.

**Klarifikasi**

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan, pihaknya harus menghormati pandangan Gubernur serta DPRD. Meskipun

adanya permasalahan tersebut, namun, pihaknya tetap berharap pemerintahan DKI Jakarta, berjalan sebagaimana mestinya. "Pemerintahan harus jalan dong, administrasi dan pelayanan publik harus terjamin jangan tersandera APBD karena politik. APBD harus selamatkan, ruang kita harus berdialog dengan kedua-duanya. Kalau hari ini kan klarifikasi keduanya. Nanti setelah merumuskan bersama dipertemukan bersama pan-

dangan masing-masing pihak," katanya.

Namun, lanjutnya, pihaknya mendukung sistem e-budgeting untuk anggaran tersebut, pasalnya sudah terdapat inpres-nya.

Meskipun demikian, keputusan politik tetap harus ada, yaitu dengan pertemuan antara Gubernur dan DPRD. "Komitmen yang kuat, DPRD juga sepakat tidak menghambat proses APBD. Kalau ada pertanyaan dan uneg-uneg kita yang memfasilitasi. Sama-sama kita dengar. Insya Allah besok (hari ini -red) jam 9 kami pertemuan kembali antara Gubernur dan DPRD untuk mengklarifikasi evaluasi RAPBD 2015. Nanti ruang itu terbuka untuk Anda, bagaimana sikap gubernur, kalau DPRD keberatan, Gubernur punya sanggahan. Kita harus dengar semua pihak," katanya.

(suf)